

PERAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

R. Moch. Agus Ramdhan¹, Aang Rahmatulloh²

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, STISIP Syamsul Ulum

¹agusramdhan2025@gmail.com, ²rahmatullohaang52@gmail.com

ABSTRACT

Governance practices in Indonesia continue to face challenges characterized by weak bureaucratic integrity, abuse of authority, and the limited implementation of good governance principles. These issues indicate that bureaucratic problems are not merely structural and administrative in nature but are also closely linked to ethical dimensions in public service delivery. This study aims to analyze the role of public administration ethics in fostering good governance. The research employs a qualitative approach using a literature review method by examining public administration theories, regulatory frameworks, and relevant scholarly articles. The findings demonstrate that public administration ethics serve as both a normative foundation and a behavioral control mechanism in promoting transparency, accountability, professionalism, and the rule of law. Strengthening the values of integrity, responsibility, and public service orientation contributes to the development of a citizen-centered organizational culture. The implications suggest that integrating ethical systems into bureaucratic reform strategies is essential for achieving effective, participatory, and sustainable governance.

Keywords: public administration ethics, good governance, bureaucratic reform, integrity, accountability

ABSTRAK

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Indonesia masih ditandai oleh lemahnya integritas aparatur, praktik penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan birokrasi tidak hanya bersifat struktural dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi publik dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis terhadap teori-teori administrasi publik, regulasi, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik berperan sebagai fondasi normatif sekaligus instrumen pengendali perilaku aparatur dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan supremasi hukum. Penguatan nilai integritas, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik terbukti

memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Implikasinya, pengembangan sistem etika yang terintegrasi dengan reformasi birokrasi menjadi strategi krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika administrasi publik, *good governance*, reformasi birokrasi, integritas, akuntabilitas

A. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, agenda reformasi birokrasi terus didorong untuk memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Namun demikian, berbagai persoalan seperti rendahnya integritas aparatur, praktik penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya budaya organisasi yang berbasis nilai masih menjadi tantangan dalam praktik administrasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup hanya dilakukan melalui pembenahan regulasi dan sistem administrasi, tetapi juga memerlukan penguatan dimensi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara konseptual, etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan

perilaku aparatur negara agar bertindak jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi (Widiasih et al., 2024). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pamungkas dan Munawir (2025) yang menegaskan bahwa penguatan standar etika dan kode perilaku aparatur mampu mendorong profesionalisme serta meminimalkan praktik maladministrasi dalam pelayanan publik.

Dalam konteks implementasi kebijakan di Indonesia, Darmawan dan Azhar (2024) mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik aparatur masih menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, Syadiyah et al. (2024) menyatakan bahwa etika administrasi publik memiliki peran strategis dalam membangun pemerintahan yang

bersih dan transparan, namun implementasinya seringkali terhambat oleh lemahnya pengawasan internal dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung nilai integritas. Penelitian lain pada level pemerintahan desa menunjukkan bahwa internalisasi nilai etika dalam praktik administrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun masih menghadapi kendala struktural dan komunikasi organisasi (Yudianto et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara etika administrasi publik dan prinsip *good governance*, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek implementatif dan belum mengkaji secara komprehensif peran etika sebagai fondasi konseptual dalam reformasi birokrasi. Etika sering diposisikan sebagai variabel pendukung, bukan sebagai elemen utama yang menopang keseluruhan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan supremasi hukum. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang memerlukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana etika administrasi publik dapat dipahami sebagai instrumen

strategis dalam mewujudkan *good governance* secara sistemik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi publik dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi etika sebagai landasan normatif dan operasional dalam administrasi publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi penguatan reformasi birokrasi melalui internalisasi nilai integritas, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) untuk menganalisis secara konseptual peran etika administrasi publik dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan.

Menurut Creswell dan Creswell (2018), pendekatan kualitatif berorientasi pada eksplorasi makna, pemahaman konteks, serta analisis terhadap pola konseptual yang berkembang dalam suatu bidang kajian. Dalam konteks administrasi publik, metode ini relevan untuk mengkaji hubungan normatif dan operasional antara etika birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen regulasi yang berkaitan dengan etika administrasi publik dan *good governance*. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) publikasi ilmiah dalam lima hingga tujuh tahun terakhir, (2) relevansi substansi dengan topik penelitian, dan (3) kredibilitas sumber yang terindeks atau diterbitkan oleh penerbit akademik bereputasi. Penggunaan literatur terbaru bertujuan untuk memastikan kebaruan dan aktualitas analisis, sebagaimana disarankan dalam penelitian berbasis tinjauan literatur sistematis (Snyder, 2019). Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan database jurnal internasional dengan

menggunakan kata kunci “public administration ethics”, “bureaucratic reform”, dan “good governance”.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang telah memenuhi kriteria seleksi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi konseptual, serta penarikan kesimpulan. Model analisis ini mengacu pada tahapan analisis kualitatif yang menekankan proses identifikasi pola, relasi antarkonsep, dan sintesis temuan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan konsistensi antara kerangka teoritis dan temuan literatur yang dianalisis.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif dari penelitian yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, peneliti menerapkan prinsip *critical appraisal* terhadap setiap sumber literatur untuk menilai kualitas metodologis dan

relevansi temuan terhadap fokus penelitian (Snyder, 2019). Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis konseptual yang sistematis mengenai posisi etika administrasi publik sebagai fondasi normatif dalam mewujudkan *good governance*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, etika administrasi publik terbukti memiliki peran strategis sebagai fondasi normatif sekaligus instrumen operasional dalam mewujudkan *good governance*. Secara normatif, etika berfungsi sebagai pedoman nilai yang mengarahkan perilaku aparatur negara agar bertindak sesuai prinsip integritas, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tanpa landasan etis yang kuat, implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum cenderung bersifat formalitas administratif dan kehilangan substansi moralnya.

Selain sebagai landasan normatif, etika administrasi publik juga berperan sebagai mekanisme operasional yang

mengendalikan perilaku birokrasi melalui penerapan kode etik, standar perilaku, dan budaya organisasi berbasis integritas. Hasil kajian menunjukkan setidaknya tiga temuan utama, yaitu: (1) etika memperkuat implementasi prinsip *good governance* secara substantif, (2) etika berfungsi sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi, serta (3) internalisasi nilai etis mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, etika administrasi publik tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan.

Etika sebagai Fondasi Normatif Tata Kelola

Literatur terbaru menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum sangat bergantung pada integritas individu serta budaya organisasi birokrasi. Tanpa komitmen etis aparatur negara, berbagai instrumen kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola sering kali hanya menjadi perangkat

administratif yang tidak efektif. Dengan demikian, etika menjadi fondasi normatif yang memberi arah sekaligus batasan dalam penggunaan kewenangan publik.

Widiasih et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan etika aparatur berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas publik serta pengurangan potensi penyalahgunaan kewenangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integritas bukan hanya atribut personal, melainkan elemen struktural yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai kerangka nilai yang memastikan setiap tindakan birokrasi tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Syadiyah et al. (2024) menyatakan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas sistem pengawasan, tetapi juga oleh internalisasi nilai moral dalam struktur organisasi. Ketika nilai integritas dan tanggung jawab tertanam dalam budaya kerja, aparatur cenderung bertindak secara konsisten dan profesional. Oleh karena itu, *good governance* tidak dapat dipisahkan

dari kualitas etis aparatur negara sebagai pelaksana utama kebijakan publik.

Etika sebagai Instrumen Pengendali Perilaku Birokrasi

Selain sebagai fondasi normatif, etika administrasi publik juga berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku birokrasi. Kode etik dan standar perilaku yang diterapkan secara konsisten mampu menjadi mekanisme preventif terhadap praktik maladministrasi dan penyimpangan kewenangan. Dalam perspektif tata kelola modern, etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sistem kontrol internal yang membatasi tindakan birokrat agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Pamungkas dan Munawir (2025) menemukan bahwa penguatan kode etik aparatur publik berdampak signifikan terhadap peningkatan profesionalisme dan konsistensi pelayanan publik. Implementasi kode etik yang jelas dan terukur mendorong aparatur untuk bekerja sesuai standar integritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, etika berperan sebagai instrumen regulatif yang

melengkapi mekanisme pengawasan formal dalam birokrasi.

Namun demikian, Darmawan dan Azhar (2024) menambahkan bahwa lemahnya penegakan kode etik dapat menyebabkan ketidakefektifan kebijakan tata kelola, meskipun perangkat regulasi telah tersedia. Ketika pelanggaran etika tidak ditindak secara tegas, norma yang ada kehilangan daya ikatnya dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang baik harus disertai dengan komitmen integritas individu agar dapat berfungsi secara optimal.

Etika sebagai Penguat Budaya Organisasi Berbasis Integritas

Temuan literatur juga mengindikasikan bahwa internalisasi nilai integritas, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik mampu membentuk budaya organisasi yang mendukung reformasi birokrasi. Budaya organisasi yang berbasis nilai etis menciptakan lingkungan kerja yang mendorong transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi. Dalam konteks ini, etika tidak hanya dimaknai sebagai aturan formal, tetapi sebagai

nilai kolektif yang mengikat seluruh anggota organisasi.

Yudianto et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan nilai etis dalam praktik administrasi di tingkat lokal berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Ketika aparatur bekerja dengan orientasi pelayanan dan tanggung jawab moral, kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih konstruktif. Hal tersebut memperkuat legitimasi institusi publik di mata warga negara.

Dengan demikian, etika administrasi publik tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan institusional. Etika membentuk karakter organisasi sekaligus menjadi penggerak transformasi budaya birokrasi menuju sistem yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan budaya integritas menjadi elemen kunci dalam strategi jangka panjang untuk mewujudkan *good governance* yang berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik memiliki posisi sentral dalam

mewujudkan *good governance*. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan regulasi atau kelengkapan sistem pengawasan, tetapi sangat bergantung pada integritas dan komitmen moral aparatur negara. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum hanya dapat berjalan secara substantif apabila didukung oleh perilaku etis dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, etika berfungsi sebagai *moral infrastructure* yang menopang efektivitas institusi pemerintahan.

Secara konseptual, pembahasan ini menempatkan etika administrasi publik bukan sebagai variabel tambahan, melainkan sebagai fondasi struktural dalam kerangka *good governance*. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung menyoroti hubungan etika dengan aspek tertentu, seperti kualitas pelayanan atau kepatuhan terhadap regulasi. Namun, hasil kajian ini menunjukkan bahwa etika memiliki hubungan kausal yang lebih luas: etika membentuk perilaku aparatur, perilaku aparatur menentukan kualitas

pelayanan dan kebijakan, dan kualitas kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, hubungan antara etika dan *good governance* bersifat sistemik dan saling memperkuat.

Selain itu, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara sistem formal dan nilai moral dalam birokrasi. Regulasi dan kode etik yang tidak diinternalisasi hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa daya transformasi. Sebaliknya, internalisasi nilai integritas, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik dapat membangun budaya organisasi yang mendukung reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan etika harus dilakukan melalui pendekatan struktural (regulasi dan pengawasan) sekaligus kultural (pendidikan, keteladanan, dan kepemimpinan berintegritas).

Dari perspektif praktis, pembahasan ini memberikan implikasi bahwa reformasi birokrasi perlu memasukkan dimensi etika sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Penguatan sistem *whistleblowing*, evaluasi kepatuhan kode etik, serta pelatihan

etika bagi aparatur menjadi langkah konkret yang dapat memperkuat implementasi *good governance*. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas memiliki peran penting dalam menciptakan keteladanan dan membangun iklim organisasi yang kondusif terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa etika administrasi publik merupakan prasyarat mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tanpa fondasi etis yang kuat, reformasi kelembagaan berpotensi kehilangan arah dan substansi. Oleh karena itu, penguatan etika tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik memiliki peran strategis sebagai fondasi normatif sekaligus instrumen operasional dalam mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini menemukan bahwa etika tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat nilai ideal, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan tindakan aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Tiga temuan utama menunjukkan bahwa: (1) etika berfungsi sebagai standar moral yang membatasi penyalahgunaan wewenang dan mendorong akuntabilitas; (2) etika menjadi mekanisme pengendali dalam sistem birokrasi untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta (3) internalisasi nilai etis mampu membentuk budaya organisasi publik yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan profesionalisme.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa implementasi *good governance* tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika sebagai kerangka normatif yang mengarahkan tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum hanya dapat berjalan secara substansial apabila didukung oleh integritas moral aparatur negara. Dengan demikian, etika administrasi publik bukan sekadar pelengkap sistem regulasi,

tetapi merupakan elemen esensial yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Implikasi teoretis penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kajian etika administrasi publik perlu ditempatkan sebagai bagian integral dalam pengembangan teori administrasi publik kontemporer. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kode etik, pendidikan dan pelatihan berbasis nilai integritas, serta sistem pengawasan internal yang konsisten guna membangun budaya birokrasi yang beretika. Reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik harus disertai dengan internalisasi nilai moral sebagai fondasi utama perubahan kelembagaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai implementasi etika administrasi publik pada konteks institusi tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan

empiris, baik melalui studi kasus maupun penelitian kuantitatif, guna menguji secara langsung hubungan antara penerapan etika administrasi publik dan tingkat keberhasilan praktik *good governance* di berbagai level pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., Denhardt, J. V., & Blanc, T. A. (2016). *Public Administration: An Action Orientation* (7th ed.). Cengage Learning.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2020). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Jurnal :

- Choirilisyah, D., & Azhar, A. (2024). *Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 195–203.
- Widiasih, S., Julina, F., & Susanti, S. (2024). *The role of ethics in public administration: A systematic review of global practices and challenge*. *Public Studies and*

- Business Administration Journal (PUSBA)*, 1(2), 105–117.
- Yudianto, E., Syamsya, M., Mustofa, A., Fian, S., & Nasution, H. (2024). *Urgensi etika administrasi publik dalam mewujudkan good governance pada pelayanan publik*. *Jurnal Niara*, 17(1), 19633.
- Pamungkas, P., & Munawir, I. (2025). *The role of ethics in improving the quality of public services*. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(9), 705.
- Syadiyah, K., Putri, S. A. N., & Hayat. (2024). *The role of public administration ethics in realizing clean and transparent governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 12(1), 7053.
- Ramadhania, C. N. S., Baiti, N., & Hayat. (2024). *Pengaruh etika administrasi publik terhadap kepercayaan publik pada instansi pemerintah*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(6), 9410.
- Latifah, P. R. A., & Hayat. (2024). *Etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik: Menghadapi tuntutan masyarakat di e-government*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(10), 10177.
- Musri, Sayid Anshar, Puryanto, Onzukrisno, & Baso Ifing. (2025). *Ethics in public administration as the foundation of good governance in the digital era*. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 5(2), 130